

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai hari ini, pemerintah di seluruh dunia bekerja untuk memajukan kesejahteraan material warganya dalam kerangka kerja di mana mereka beroperasi. Tingkat kemiskinan beserta indeks pembangunan manusia ialah dua ukuran yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kemakmuran suatu negara..(Ernita et al., 2013)

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Pembukaan UUD 1945, peningkatan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan utama negara dalam rencana pembangunan nasionalnya. Menurut Biro Pusat Statistik (2000), kesejahteraan umum suatu negara tercapai ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganya terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak, tumbuh sebagai individu, dan berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat dicirikan tergantung pada jumlah kemiskinan penduduk di Indonesia. Seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, kesejahteraan umum penduduk negara tersebut juga menurun. (Sri Yuniarti, 2016)

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah mensponsori sejumlah program pembangunan nasional. Salah satu caranya ialah dengan mengarahkan program-program pembangunan daerah, seperti yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup baik di daerah sejahtera maupun daerah tertinggal. Setiap kepentingan dan tuntutan daerah diperhitungkan untuk memberikan proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang negara menetapkan dasar dan tujuan. Penurunan angka kemiskinan dijadikan sebagai barometer kemajuan pembangunan nasional di Indonesia. (Jundi & POERWONO, 2014)

Negara-negara yang masih dalam proses pembangunan atau mereka yang berada di Selatan global yang menderita kemiskinan yang parah, rumit, dan multifaset sangat rentan terhadap dampak negatif kemiskinan terhadap

perekonomian mereka. Kemiskinan bukanlah kejadian spontan; sebaliknya, ia memiliki sejarah yang panjang dan berbelit-belit yang membuatnya sulit untuk menentukan asal-usulnya. Kemiskinan juga multifaset, termasuk berbagai macam kebutuhan manusia, dan kemiskinan aset ialah aspek penting lainnya. Struktur organisasi dan politik, jenis keahlian primer dan tersier dan modal sosial, serta ketersediaan atau kekurangannya, semuanya merupakan contoh kemiskinan sumber daya dan pengetahuan. Kemiskinan, menurut definisinya sendiri, menyebabkan kurangnya sumber daya, termasuk makanan, air, tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. **.Margaretha Larasati dkk, (2021).**

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran komparatif global umur panjang, melek huruf, pendidikan, dan pendapatan. Tingkat pembangunan suatu negara dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi HDI, dan dampak kebijakan ekonomi saat ini terhadap kualitas hidup warga negara dapat dievaluasi. **.(Davies & Quinlivan, 2006)**

Berguna untuk Pembangunan Manusia sebagai Konsep. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 bertujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini hanya bisa dicapai jika ada kelompok pengawas yang mengawasi pertumbuhan daerah sekitarnya. Indeks Pembangunan Manusia ialah alat tambahan untuk mengukur tingkat kemajuan yang dibuat di tingkat nasional atau daerah (IPM).

Banyaknya kemiskinan di suatu negara bisa dikendalikan oleh banyak aspek, misalnya zakat. Syariat Allah SWT mengamanatkan bahwa persentase tertentu dari kekayaan, yang dikenal sebagai zakat, didistribusikan setiap tahun kepada mereka yang berhak. (Qardawi, 1991). Kata zakat di terminologi al-Qur'an selaras dengan kata shadaqah maupun sedekah.

Bukti empiris menunjukkan bahwa di banyak negara Muslim, seperti Bangladesh dan Malaysia, zakat memiliki pengaruh yang bermanfaat dan besar terhadap pembangunan manusia. Berbagai penelitian telah meneliti seberapa besar

dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam pendekatan Bangladesh untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat karena sistem negara untuk menyalurkan dana untuk produksi atau investasi daripada konsumsi. Jika kapasitas zakat di negara ini dimaksimalkan, ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan dukungan dari undang-undang pemerintah, maka tujuan pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat terwujud, catat Jaelani (2015).

Khasandy dan Badrudin 2019 memberikan penelitian dari Indonesia yang menemukan bahwa zakat tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB atau kesejahteraan individu..

Pendanaan syariah mempengaruhi pertumbuhan manusia dan kemiskinan. Pembiayaan, atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang diantisipasi, dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan imbalan atau bagi hasil disebut pembiayaan berdasarkan syariah merupakan isi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 memungkinkan bank dan pihak lain dalam menyepakati pembiayaan syariah, seperti bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang untuk keuntungan (murabahah), maupun (ijarah wa iqtina).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga mempengaruhi kemiskinan dan pembangunan manusia (APBN). Anggaran mencakup semua aktivitas perusahaan, dipaparkan dengan angka moneter, serta berlaku untuk suatu periode. Dari perspektif ini, anggaran ialah produksi, terutama prakiraan masa depan. Anggaran disusun secara teratur dan metodis sejak merupakan output. Penganggaran ialah mengembangkan anggaran..

Mangkoesebroto (2016) mengatakan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan. Kebijakan pemerintah memiliki biaya. Anggaran federal mencakup pengeluaran ini. Anggaran lapangan menunjukkan dedikasi pemerintah untuk isu-isu tersebut. Pemerintah pusat setiap tahunnya mendeklarasikan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) selaku hak beserta komitmennya terhadap pembangunan. Sesuai dengan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah tiap tahun menerbitkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak UU 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah disahkan, hal ini sejalan dengan otonomi daerah. Instrumen kesejahteraan utama pemerintah ialah APBN dan APBD..

Tabel 1.1
Data Dana Zakat, Pembiayaan Syariah, APBN, IPM, dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Dana Zakat(X1)	Pembiayaan Syariah(X2)	APBN (X3)	IPM(Y1)	Tingkat Kemiskinan(Y2)
2010	930 Miliar	68,181 Triliun	111,4 Triliun	66,53	12,5
2011	1,73 Triliun	102,6 Triliun	212,1 Triliun	67,09	12,2
2012	2,21 Triliun	147,5 Triliun	124,2 Triliun	67,70	11,96
2013	2,64 Triliun	184,1 Triliun	653,8 Triliun	68,31	11,36
2014	3,3 Triliun	199,3 Triliun	910,2 Triliun	68,90	11,25
2015	3,65 Triliun	203,9 Triliun	2.039,5 Triliun	69,55	11,22
2016	5,02 Triliun	248,0 Triliun	2.176,3 Triliun	70,18	10,86
2017	6,22 Triliun	285,7 Triliun	1.448,8 Triliun	70,81	10,64
2018	8,12 Triliun	320,2 Triliun	1.942,3 Triliun	71,39	9,82
2019	10,23 Triliun	355,2 Triliun	2.689,8 Triliun	71,92	9,41

2020	12,43 Triliun	383,9 Triliun	2.595,4 Triliun	71,94	12,53
2021	14 Triliun	421,57 Triliun	1.954,5 Triliun	72,29	7,6

Sumber : Data diolah

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total masyarakat miskin Indonesia turun 1,04 juta menjadi 26,5 juta di Maret 2021. Penduduk miskin turun 1,05 juta dari September 2020. Pada September 2021, 9,71% miskin, merosot 0,43 poin persentase dari Maret 2021. Kemiskinan turun 0,48 persen dari September 2020. Meski berkurang, kemiskinan masih lebih tinggi dibanding sebelum wabah COVID-19..(Statistik, n.d.)

IPM 2021 naik di semua dimensi. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita aktual turun, memperlambat IPM (d disesuaikan). HDI 2010–2021.

IPM terbit IPM Indonesia naik 0,76 persen selama 2010–2021. Umur panjang, pendidikan, dan taraf hidup yang adil semuanya tumbuh dalam HDI 2021. Hal ini berbeda dengan IPM 2020 yang hanya mendukung peningkatan umur, hidup sehat, dan pengetahuan, tetapi standar dimensi hidup harus turun. Pengeluaran riil rata-rata per kapita (d disesuaikan) akan naik 1,30 persen pada tahun 2021, yang menentukan kehidupan yang baik.

Penduduk usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 13,08 tahun (dapat mengikuti pendidikan formal), yang kira-kira sama dengan waktu untuk mendapatkan Diploma I. Angka ini lebih tinggi 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,98 tahun. Pada tahun 2021, individu berusia 25 tahun ke atas akan menghabiskan 8,54 tahun untuk pendidikan, naik 0,06 tahun dari 8,48 tahun. Dalam hal umur dan kesehatan, bayi baru lahir tahun 2021 diperkirakan hidup 71,57 tahun, 0,10 tahun lebih lama dari mereka yang lahir pada tahun 2020..

Pada September 2021, 14,64 juta orang (12,53%) hidup dalam kemiskinan pedesaan, turun 730 ribu (7,6%) penduduk miskin perkotaan turun 320 ribu dari Maret 2021 dan 180 ribu terhitung sejak September 2020. Tingkat kemiskinan nasional September 2021 sejumlah Rp 486,17 ribu per kapita per bulan. Rincian:

Rp 360 ribu per kapita per bulan guna makanan beserta Rp 126,16 ribu guna non makanan.

Berikutnya ialah pengelolaan zakat Indonesia yang masih amatir sehingga menghambat pertumbuhannya. Zakat menjadi basis yang sangat besar bagi masyarakat setelah Covid-19, namun lembaga zakat (Baznas dan LAZ) juga goyah sehingga pengumpulannya menurun meskipun jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan bertambah. Lembaga zakat harus kebal dari kondisi mengerikan ini. SDM ialah masalah lain. Kebanyakan amil di lembaga zakat berasal dari perguruan tinggi negeri karena lembaga pendidikan menghasilkan lebih sedikit amil. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di berbagai perguruan tinggi kurang diminati. Meski memiliki keahlian amil dan nazhir yang memahami fiqh dan manajemen zakat. Lembaga zakat membutuhkan amil profesional, namun lulusan universitas sedikit. Pengetahuan zakat Indonesia menjadi isu berikutnya. Pembatasan pemerintah, imbauan, dan fatwa ada. Namun, pengetahuan zakat yang buruk menyebabkan rendahnya penghimpunan dan pendistribusian zakat..(Monitor, n.d.)

Zakat nasional sangat besar. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) memperkirakan peluang zakat Indonesia tahun 2019 sebesar Rp233,8 triliun atau 1,72% dari PDB tahun 2018 (Rp13.588,8 triliun) (Puskas BAZNAS, 2019). Zakat korporasi pada 2019 Rp 6,71 triliun. Zakat korporasi pada 2020 mencapai Rp 144,5 triliun. Potensi zakat Indonesia 2020 sebesar Rp 327,6 triliun.

Masalah berikutnya ialah pendanaan syariah Indonesia yang tumbuh 8,08% di tahun 2020 dibandingkan 10,89% di tahun 2019. Pembiayaan musyarakah turun 21,56% di tahun 2019 dan 11,26% di tahun 2020. Pinjaman modal kerja melambat menjadi 4,14% dari 6,00% di tahun sebelumnya sedangkan Investasi pembiayaan turun menjadi 0,16% dari 14,84%. Terlepas dari wabah COVID-19 yang mengurangi keuangan sektor industri.

Masalah terakhir ialah keuangan negara, termasuk defisit pokok, utang negara, penyerapan anggaran daerah yang tidak mencukupi, dan penyertaan modal negara (PMN). Ketika anggaran negara dinaikkan secara dramatis selama krisis

pandemi, menyebabkan peningkatan defisit dan utang, perekonomian tidak akan berjalan kian apik dibandingkan negara lain yang bisa mengatur anggarannya. Didik mencatat, defisit APBN meningkat dari 2019 ke 2021, sebelum adanya wabah COVID-19. Ia khawatir pemerintahan dan parlemen berikutnya akan mewarisi utang APBN yang terus membengkak, baik dalam kondisi pandemi maupun tidak. Kementerian Keuangan mengungkapkan defisit APBN semester I/2021 sejumlah Rp 283,2 triliun maupun Januari-Juni 2021. 1,72 persen dari PDB. Kementerian Keuangan mengantisipasi defisit APBN sebesar Rp1.006,4 triliun pada tahun 2021..(Saputra, n.d.)

Larasati dkk. (2017) menemukan bahwa pendanaan Islam merugikan pengentasan kemiskinan. Arianto (2011) menemukan bahwa pendanaan syariah mengurangi kemiskinan.

Inkonsistensi peneliti dalam studi sebelumnya menciptakan kesenjangan penelitian, memotivasi dia untuk lebih memahami faktor dependen dan independen. Penelitian ini didasarkan pada fenomena masa lalu dan kesenjangan penelitian. Penulis ingin membahas perihal **“Pengaruh Dana Zakat, Pembiayaan Syariah, Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening”**.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan konteks yang sudah dikemukakan sebelumnya, bisa diketahui identifikasi masalah yakni:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan masyarakat miskin Indonesia turun 1,04 juta menjadi 26,5 juta pada Maret 2021.
2. IPM. IPM Indonesia naik 0,76 persen selama 2010–2021. Umur panjang, pendidikan, dan taraf hidup yang adil semuanya tumbuh dalam HDI 2021.

3. Zakat gagal di Indonesia karena administrasi yang tidak kompeten, dan lembaga pendidikan menghasilkan sedikit amil zakat, sehingga sebagian besar amil di lembaga zakat berasal dari perguruan tinggi negeri. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di berbagai perguruan tinggi kurang diminati. Meski memiliki keahlian amil dan nazhir yang memahami fiqih dan manajemen zakat.
4. Penyaluran pembiayaan tahun 2020 naik 8,08%, lebih lambat dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,89%.
5. Defisit APBN Januari-Juni 2021 sebesar Rp283,2 triliun. 1,72 persen dari PDB. Kementerian Keuangan mengantisipasi defisit APBN sebesar Rp1.006,4 triliun pada tahun 2021.
6. Perbedaan hasil penelitian terdahulu / *research gap*.

C. Batasan Masalah

Studi ini mengkaji bagaimana Zakat, Pembiayaan Syariah, beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berlandaskan pemaparan latar belakang:

1. Apakah zakat berpengaruh terhadap kemiskinan Indonesia?
2. Apakah pendanaan syariah mempengaruhi kemiskinan Indonesia?
3. Apakah APBN mempengaruhi kemiskinan Indonesia?
4. Apakah zakat, pendanaan syariah, dan APBN mempengaruhi kemiskinan Indonesia secara simultan?
5. Apakah Indeks Pembangunan Manusia mampu memediasi Zakat, Pembiayaan Syariah, beserta APBN untuk Kemiskinan Indonesia??

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki tujuan::

- a. Memahami bagaimana zakat mempengaruhi kemiskinan Indonesia.
- b. Menentukan bagaimana pendanaan syariah mempengaruhi kemiskinan Indonesia.
- c. Menentukan bagaimana APBN mempengaruhi kemiskinan Indonesia.
- d. Untuk mengetahui bagaimana efek zakat, pendanaan syariah, beserta APBN pada kemiskinan Indonesia secara bersamaan.
- e. untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia memediasi Zakat, Pembiayaan Syariah, beserta APBN terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil belajar harus bernilai dan memberikan manfaat lain, di antaranya sebagai berikut. :

- a. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi mereka yang tertarik untuk menggunakan, memperluas, dan melakukan penelitian dengan topik "Dampak Zakat, Pembiayaan Syariah, beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kemiskinan di Indonesia, Menghitung Perbedaan Skor Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh 34 Provinsi."
- b. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi pemahaman ilmiah tentang Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tingkat Kemiskinan dengan menggunakan Indeks Pembangunan

Manusia selaku variabel Intervening di 34 Provinsi di Indonesia

- 2) Penulis penelitian menginginkan temuan mereka menjadi sumber untuk peneliti lainnya.
- 3) temuan penelitian ini bisa dijadikan tolok ukur untuk peneliti selanjutnya di bidang yang serupa.

